

Ideologi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Azizurohim

Program Studi Ilmu Pengetahuan sosial, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: zuzirohim@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila, ideologi,
pedoman. globalisasi,
ideologi terbuka

Keywords:

Pancasila, ideology,
guidelines, globalization,
open ideology

ABSTRAK

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki karakter unik karena bersifat terbuka, dinamis, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila tidak bersifat dogmatis ataupun kaku, melainkan memberikan ruang bagi interpretasi, pembaruan, dan penerapan nilai-nilainya sesuai kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan prinsip dasarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keterbukaan ideologi Pancasila, implikasinya terhadap pembangunan nasional, serta tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan relevansinya di tengah perubahan sosial, politik, dan global. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap berbagai karya ilmiah dan dokumen resmi

terkait Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan Pancasila memperkuat fungsinya sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara karena mampu mengakomodasi nilai demokrasi, HAM, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, sifat keterbukaan tersebut juga menimbulkan potensi penyimpangan interpretasi yang dapat menggeser nilai-nilai fundamental Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam, pendidikan Pancasila yang berkelanjutan, dan mekanisme kontrol sosial untuk memastikan bahwa reinterpretasi nilai berlangsung dalam koridor prinsip dasar Pancasila. Studi ini menegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka tetap relevan sebagai fondasi kehidupan nasional sepanjang pemaknaannya dilakukan secara kontekstual namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai aslinya.

ABSTRACT

Pancasila has a fundamental role as the moral foundation of the Indonesian nation. Pancasila is a source of relevant ethical values in facing the challenges of the digital era. In the context of very rapid technological development, the young generation must live in a digital environment that is full of opportunities as well as risks, such as the spread of hoaxes, social polarization, and the weakening of digital moral and ethical values. Various studies say that the internalization of Pancasila values in education is still far from optimal, this is due to a learning approach that tends to be normative and less relevant to the digital reality of the younger generation. In fact, the concept of digital citizenship emphasizes the need for a combination of digital literacy competencies and Pancasila moral values as a guideline for behavior in cyberspace. Pancasila with the principles of humanity, social justice, responsibility, and unity is very much in line with the basic values of modern digital ethics such as accountability, constructive freedom, and social responsibility. In the era of Society 5.0, when generation Z, millennials, and Gen Alpha are the largest internet users, the need to integrate the value of Pancasila into digital education practices has become increasingly urgent. Previous studies have highlighted aspects of digital ethics, character education, and digital citizenship separately, but there has been no research that has developed a comprehensive model that combines digital literacy, digital ethics, and the strengthening of national identity based on Pancasila. This research aims to analyze the process of internalizing Pancasila values in digital era education, formulate a Pancasila education model based on digital literacy and ethics, and identify effective pedagogical strategies through PPKn learning. Technology.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi nasional yang mengandung nilai-nilai fundamental dalam membentuk identitas, arah pembangunan, serta kehidupan kenegaraan Indonesia (Faslah, 2025). Sejak perumusan awalnya pada tahun 1945, Pancasila telah ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan menjadi pedoman etis bagi seluruh penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Kaelan, 2016). Namun, posisi strategis tersebut tidak serta-merta menempatkan Pancasila sebagai ideologi yang kaku. Dalam dinamika sosial-politik yang terus berubah—baik pada masa awal kemerdekaan, era pembangunan, reformasi, hingga era globalisasi digital—Pancasila justru menunjukkan kemampuan adaptifnya. Kemampuan inilah yang kemudian menegaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka (Saputra, 2025).

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki dua karakter utama: (1) nilai dasar yang bersifat tetap, dan (2) nilai instrumental serta praksis yang dapat berkembang sesuai konteks zaman. Nilai dasar seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial merupakan prinsip universal yang tidak dapat diubah. Akan tetapi, implementasi nilai-nilai tersebut dapat disesuaikan melalui kebijakan publik, peraturan perundang-undangan, dan praktik sosial yang relevan dengan kondisi masyarakat. Dengan demikian, Pancasila tidak berdiri sebagai sistem ideologis yang dogmatis, melainkan sebagai ideologi yang memberi ruang dialog, reinterpretasi, dan pembaruan (Pranarka, 1987).

Dalam konteks globalisasi yang membawa arus informasi, budaya, serta ideologi transnasional, keterbukaan Pancasila menjadi kunci untuk menjaga stabilitas nilai sekaligus responsivitas terhadap perkembangan dunia. Ideologi ini berfungsi sebagai filter yang mengakomodasi nilai-nilai positif dari luar, namun tetap mempertahankan identitas bangsa. Selain itu, keterbukaan Pancasila terlihat dalam perannya sebagai landasan kebijakan di era demokrasi modern: penguatan hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta penguatan toleransi dan pluralisme. Semua ini menunjukkan bahwa Pancasila dapat terus diperbarui relevansinya tanpa menghilangkan fondasi normatif yang telah ditetapkan para pendiri bangsa (Rahayu, 2025).

Oleh karena itu, kajian akademik mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka menjadi penting untuk memastikan pemahaman komprehensif terhadap sifat dinamisnya. Penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik, tetapi juga bagaimana ideologi ini dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan transformasi bangsa di masa depan. Dengan analisis tersebut, diharapkan pemaknaan terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat semakin diperkaya, diperkuat, dan diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan nasional.

Metode Penelitian

Dalam penelitian mengenai Ideologi Pancasila sebagai Ideologi Terbuka, metode yang digunakan harus mampu menjelaskan secara mendalam karakter, dinamika, dan

relevansi Pancasila dalam konteks perubahan sosial, politik, dan global yang terus berlangsung. Kajian terhadap ideologi bersifat konseptual dan normatif, sehingga pendekatan penelitian tidak bertumpu pada data empiris semata, melainkan pada analisis literatur, interpretasi teks, serta pemahaman teoretis yang komprehensi (Pranarka, 1987).

Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali nilai-nilai dasar Pancasila, memahami konteks historis terbentuknya konsep ideologi terbuka, serta mengkaji bagaimana implementasi nilai-nilai tersebut beradaptasi dengan perkembangan zaman. Melalui analisis terhadap dokumen resmi negara, buku, artikel ilmiah, dan pandangan para ahli, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman mendalam mengenai keterbukaan Pancasila sebagai ideologi yang dinamis namun tetap berakar pada prinsip-prinsip fundamental.

Pendekatan metodologis ini memungkinkan peneliti menyusun analisis secara sistematis, mengidentifikasi pola pemikiran, serta merumuskan argumentasi yang kuat mengenai posisi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dengan demikian, bagian metode penelitian ini tidak hanya menjadi pedoman teknis penelitian, tetapi juga menjadi landasan epistemologis dalam menafsirkan dan memahami ideologi Pancasila secara lebih kritis dan ilmiah.

Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara

Pancasila merupakan fondasi ideologis dan filosofis bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memuat lima sila sebagai nilai-nilai fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila bukan hanya menjadi sumber dari segala sumber hukum, tetapi juga menjadi pedoman etis dalam perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pemerintahan, serta pembentukan karakter nasional (Sujana et al., 2025). Pancasila juga berperan sebagai sistem nilai yang memberikan arah bagi pembangunan nasional, terutama dalam menghadapi dinamika global dan perubahan sosial yang semakin kompleks.

Dalam dinamika pembangunan nasional dan perubahan sosial yang cepat, eksistensi Pancasila menghadapi berbagai tantangan, baik dari arus globalisasi, perkembangan teknologi, maupun perubahan nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai relevansi, implementasi, serta pemaknaan Pancasila sebagai dasar negara menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tetap mampu mengarahkan perjalanan bangsa. Studi mengenai penerapan Pancasila dalam praktik kenegaraan dan kehidupan sosial juga diperlukan guna menilai sejauh mana Pancasila benar-benar menjadi landasan bagi pengambilan keputusan dan perilaku warga negara (Pranarka, 1987).

Pendekatan akademik terhadap Pancasila memungkinkan adanya analisis yang lebih kritis, sistematis, dan ilmiah terhadap nilai-nilai dasar tersebut. Dengan demikian, penelitian tentang Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya bertujuan memperkaya khazanah keilmuan, tetapi juga menjadi upaya strategis dalam memperkuat jati diri bangsa serta menjaga keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Murdiansyah et al., 2025).

Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang berperan sebagai landasan normatif dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara (Faslah, 2025). Sejak dirumuskan oleh para pendiri bangsa pada 1945, Pancasila telah menjadi fondasi yang mempersatukan keberagaman etnis, agama, budaya, dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai gagasan filosofis, tetapi juga sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*) yang mengarahkan perilaku kolektif bangsa dalam mencapai tujuan nasional (Jazuli, 2025).

Pengertian Pancasila Ideologi Terbuka

Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang tetap dan tidak dapat diubah, tetapi penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bersifat fleksibel, dapat menyesuaikan perkembangan zaman, serta terbuka terhadap pemikiran baru selama tidak bertentangan dengan prinsip dasarnya. Nilai dasar Pancasila, Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, bersifat universal dan menjadi fondasi yang tidak berubah. Namun, cara nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam kebijakan, peraturan, dan praktik sosial dapat berkembang dan diperbarui sesuai tantangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia. Tidak bersifat dogmatis, tetapi memberi ruang interpretasi yang kreatif dan kontekstual. Adaptif dan responsif terhadap perubahan, tanpa meninggalkan nilai fundamentalnya, Mendorong dialog, partisipasi, dan inovasi dalam merumuskan kebijakan publik.

Ideologi Pancasila Yang Bernegara dan Berbangsa

Ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan sebagai landasan dasar, arah, serta pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan kolektif masyarakat Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara secara formal, tetapi juga mengandung nilai moral, etika, dan filosofis yang membimbing perilaku warga negara, lembaga negara, serta proses penyelenggaraan pemerintahan (Mulyoto, 2020). Dalam konteks kenegaraan, Pancasila berperan sebagai dasar hukum sekaligus acuan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan. Sementara itu, dalam kehidupan kebangsaan, Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral, perekat persatuan, serta dasar pembentukan karakter masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila—Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan—harus tercermin dalam setiap peraturan perundang-undangan serta dalam praktik penyelenggaraan negara, termasuk dalam upaya menjamin keadilan sosial, penghormatan terhadap hak

asasi manusia, penguatan persatuan nasional, dan pelaksanaan demokrasi yang berlandaskan musyawarah

Pancasila Sebagai Ideologi Yang Reformatif Dinamis dan Terbuka

Secara filosofis, Pancasila merupakan sistem nilai yang memadukan unsur religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi ideologi yang membimbing arah kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Keistimewaan Pancasila sebagai ideologi terletak pada kemampuannya untuk menyeimbangkan dimensi normatif dan empiris, sehingga menjadikannya tidak hanya ideal sebagai panduan moral, tetapi juga operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Revisi perundang-undangan, reformasi birokrasi, modernisasi tata kelola pemerintahan, serta pembaharuan pendidikan merupakan bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, nilai-nilai Pancasila dapat memandu inovasi kebijakan, seperti terkait perlindungan data pribadi, etika teknologi informasi, dan penguatan demokrasi digital. Pembaharuan dilakukan melalui prosedur demokratis sehingga tetap sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagai pelaksanaan sila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan...” (Wijayanti, 2023)

Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Terbuka

Ideologi terbuka merupakan sistem nilai yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Sifat keterbukaan ini menjadikan suatu ideologi tetap relevan, fleksibel, serta mampu merespons berbagai perubahan sosial, politik, maupun teknologi yang terus berkembang. Dalam konteks tersebut, keterbukaan ideologi didorong oleh berbagai faktor, seperti dinamika masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan globalisasi yang menuntut penyesuaian dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meskipun bersifat terbuka, ideologi tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental yang menjadi identitas dan pedoman utama. Sebagaimana dijelaskan oleh (Murdiansyah et al., 2025), keterbukaan ideologi tidak berarti menghilangkan jati diri, melainkan merupakan upaya untuk mempertahankan nilai dasar sambil menyesuaikan implementasinya dengan realitas sosial yang terus berubah. Dengan demikian, ideologi terbuka mampu menjadi landasan yang dinamis sekaligus stabil dalam menghadapi berbagai tantangan di era modern.

Kesimpulan dan Saran

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia memiliki posisi fundamental dalam membentuk karakter, arah pembangunan, serta integrasi kehidupan berbangsa dan bernegara (Latif, 2011). Sebagai ideologi yang digali dari nilai-nilai budaya bangsa, Pancasila mampu menjadi perekat persatuan di tengah keberagaman etnis, agama, dan budaya. Kekuatan Pancasila terletak pada sifatnya sebagai ideologi terbuka, yang memungkinkan nilai-nilainya tetap relevan dan adaptif

terhadap dinamika zaman tanpa melepaskan prinsip-prinsip dasarnya. Dalam konteks penyelenggaraan negara, Pancasila berfungsi sebagai pedoman normatif bagi seluruh aspek kebijakan publik, sistem hukum, serta praktik demokrasi di Indonesia (Latif, 2018). Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar formal, tetapi juga sumber etis dan filosofis yang mengarahkan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Menjaga Nilai Dasar Pancasila: Pancasila harus tetap berpegang pada nilai-nilai dasar lima sila seperti Ketuhanan, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun terbuka untuk perubahan, nilai-nilai dasar tersebut tidak boleh diubah. **Mengembangkan Implementasi Kontekstual:** Perlu ada pengembangan dan penafsiran nilai-nilai Pancasila agar sesuai dengan kondisi dan tantangan zaman tanpa menghilangkan esensi asli Pancasila. Ini termasuk penerapan nilai-nilai secara konkret dalam kehidupan modern dan global. **Menghargai Keberagaman:** Pancasila harus terus menjadi landasan yang inklusif yang menghormati keberagaman budaya, agama, serta pendapat dalam masyarakat Indonesia. Ini sangat penting untuk menjaga persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman.

Daftar Pustaka

- Faslah, R. (2025). *Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa*. UIN Malang Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Jazuli, I. (2025). Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa. *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 100–114.
- Mulyoto, G. P. (2020). *Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia* [Video recording]. <https://repository.uin-malang.ac.id/10825/>
- Murdiansyah, I., Slamet, S., Hamdani, H., & As'ady, M. (2025). Pentingnya spirit Pancasila benteng penahan gempuran Artificial Intelligence dalam bisnis dan pendidikan akuntansi. *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 10(01), 36–42. <https://repository.uin-malang.ac.id/23881/>
- Pranarka, A. M. W. (1987). Pancasila sebagai ideologi terbuka. *Analisis CSIS*, 16(4), 406–406.
- Rahayu, A. S. (2025). *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi: Paradigma Baru dalam Menanamkan Nilai Bangsa*. Bumi Aksara.
- Saputra, E. (2025). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Pendidikan Tinggi: Membangun Karakter Bangsa serta Tantangan Kontemporer*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Sujana, I. G., Santika, I. G. N., Karmani, G., & Mesa, J. (2025). Integrasi Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Perumusan Kebijakan Hukum Nasional. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(2), 66–74.
- Wijayanti, B. N. E. (2023). Analisis Implementasi Demokrasi Pancasila di Era Reformasi. *Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 163–170.